

PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA MEA

EKONOMI

Padang - Sumatera Barat
27 - 28 Oktober 2016

IFKM
DSEI
2016



Penyelenggara



Co-Host



PROSIDING KONFERENSI NASIONAL

**Pengabdian kepada Masyarakat dan
Corporate Social Responsibility
PKM-CSR 2016**

**Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di
Era MEA**

Padang, 27 – 28 Oktober 2016

SERI EKONOMI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat dan
Corporate Social Responsibility I
PKM-CSR 2016

**Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di
Era MEA**

SERI EKONOMI

ISBN: 978-602-97797-5-2

Editor : Rudy Pramono
Adolf J.N. Parhusip

Kulit Muka : Eston K. Mauleti

Tata Letak : Michael

Penerbit:

LPPM Universitas Pelita Harapan

Lippo Karawaci, Tangerang

T. 021 5460901

F. 021 5460910

Email: lppm@uph.edu

Cetakan pertama, Oktober 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Isi manuskrip sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat dan
Corporate Social Responsibility
PKM-CSR 2016

**Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di
Era MEA**

SERI EKONOMI

REVIEWER:

P.M Winarno
Rudy Pramono
Endah Murwani
Kholis Audah
Arko Djajadi
Indiwan Seto Wahyu Wibowo
Friska Natalia
Adolf J.N. Parhusip
Nila Krishnawati Hidayat
Tanika D. Sofia
Eka Budiarto
Sri Mulatsih

DAFTAR ISI

Kata Pengantar				iv
Pendahuluan				vi
Daftar Isi				viii
No	Penulis	Institusi	Judul Makalah	
1	Widayatmoko, Lusia Savitri Setyo Utami	Universitas Tarumanagara	Memperbaiki Kualitas Pelayanan melalui Service Excellence untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen	1
2	I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasa	Politeknik Pariwisata Batam	Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Propinsi Kepulauan Riau	13
3	Ingra	Universitas Dharma Andalas	IbM Kelompok Usaha Rajutan Tangan Yang Mengalami Penurunan Produktivitas dan Mutu Rajutan	20
4	Yusnaena, Syahril., Dra.Erdasti Husni, M.Fakhi Zaki.	Universitas Dharma Andalas	IbM Pengembangan Masyarakat melalui Pelatihan Manajemen Usaha Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Kerupuk Sakura dan Roda ganding	26
5	Yuhelmi, Mery Trianita, Nailal Husna	Universitas Bung Hatta	Upaya Menjadikan Konsumen Cerdas memilih Makanan yang Bebas Zat Aditif dalam Menggunakan Hak dan Kewajiban Konsumen	36
6	Nurminingsih, Tiwi Nurhastuti, Desmiwati	Universitas Respati Indonesia	Analisis Pembentukan Kluster Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Pengrajin Asoseris di Desa Taman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi	44
7	Lusi Dwi Putri	Universitas Lancang Kuning	Kolaborasi Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru	50
8	Linda Wati	Universitas Bung hatta	Pengaruh Merek, Label dan Kemasan Dalam Meningkatkan Penjualan Kue Aneka Rasa di Kecamatan Kuranji	57
9	Izza Mafruhah	Universitas Sebelas Maret	Model Sheltered Workshop Pada Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	66
10	Mitayani,Nova Fridalni,Aida Minropa	STIKes MERCU BAKTIJAYA	Pemanfaatan Terong sebagai Pemanfaatan Terong Sebagai Manisan untuk Meningkatkan Perekonomian Petani	81
11	Desi Handayani , dan Yusnani	Politeknik Negeri Padang	Jajanan Halalan Thoyiban di Kota Padang	85
12	Zarah Puspitaningtyas	Universitas Jember	Mengakuntansikan Corporate Social Responsibility: Pengukuran dan	94

	Nurul Istiqomah , Nunung Sri Mulyani3 , Izza Mafruhah	Sebelas Maret	commerce dalam Mendukung Perkembangan Industri Kripik Tempe di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur	
27	Evi Susanti Tasri, Kasman Karimi, Irwan Muslim	Universitas Bung Hatta	Analisis dampak Pengembangan Usaha Roti dan Kue Khas Daerah Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kekuatan Ekonomi Lokal	261
28	Saharuddin, Husna, Rustam Abd.Rauf	Universitas Tadulako	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis UMKM dalam Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Wilayah Ring 1 Tambang Nikel Pomala dan Issu Lingkungan.	271
29	Emrizal	Politeknik Negeri Padang	Usaha Biro Perjalanan sebagai Salah satu Usaha Penunjang Pariwisata Sumatera Barat	288
30	Popi Fauziati , Resti Yulistia M., Arie Frinola Minovia	Universitas Bung Hatta	Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan untuk Kelompok Usaha Kripik di Desa Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai	299
31	Kusrini	STMIK AMIKOM Yogyakarta	Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha "CITRAMAS" melalui proses legalitas Koperasi	308
32	Anik Sri Widowati, Kusrini	STMIK AMIKOM Yogyakarta	PENINGKATAN KETRAMPILAN IBU-IBU PKK MELALUI PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT	321
33	Mulatsih, Ditiya Himawati, Lista Kuspriatni	Universitas Gunadarma	Analisis Faktor-Faktor Penghambat Kinerja UMKM dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Studi Kasus pada UMKM Kerajinan Gerabah di Bantul Yogyakarta	330
34	Leonardi, Lucky Kurniawan	Politeknik UBAYA	Promosi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	338
35	Herawati, Yuhelmi,Dwi Fitri Puspa, Ethika	University Bung Hatta	Sosialisasi Penerapan Akuntansi Bagi Pelaku Usaha UMKM Kecamatan Padang Barat	349
36	Murni Ramli 1 , Nurmiyati 2 , Yudi Rinanto	Universitas Sebelas Maret	Pengembangan Suvenir Lokal Wisata Pantai Krakal	360
37	Yeasy Darmayanti, Novia Rahmawati, Suryadimal, Yunilma, Dandes Rifa	Universitas Bung Hatta	Pemberdayaan Remaja Mesjid Melalui "Gerakan REMAS Berwirausaha"	370
38	Yeasy Darmayanti, Harfiandri Damanhuri,	Universitas Bung Hatta	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN "APAR" SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN	379

PROMOSI PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
(Promoting Sustainable Community Development in Indonesia)

Leonardi Lucky Kurniawan
Politeknik Ubaya

ABSTRAK

Kesenjangan sosial merupakan masalah kompleks dan sangat menyolok di Indonesia. Pemicu utama masalah ini antara lain adalah kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja atau job opportunities. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kesenjangan sosial antara lain berupa pemberdayaan masyarakat melalui program capacity building. Pengamatan menunjukkan program pemberdayaan masyarakat belum membuahkan hasil optimal seperti yang diharapkan. Banyak sekali program yang dijalankan merupakan fragmented program (program sepotong-sepotong dan tidak tuntas) dan atau program yang kebanyakan berfokus pada hasil (result-oriented) dan kurang memperhatikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Paper ini memaparkan dan menguraikan pentingnya pendekatan holistik dalam pemberdayaan masyarakat melalui sinergi kelembagaan dengan melibatkan berbagai institusi terkait antara lain meliputi perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah (pusat dan daerah) dan organisasi sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial untuk mewujudkan transformasi (transformational change). Paper juga mengulas 5 (lima) pilar penting atau 5 Core Principles to Sustainable Development untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam menghadapi MEA dan globalisasi.

Kata kunci : kesenjangan sosial, pendekatan holistik, sinergi kelembagaan, transformational change, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan alam yang berlimpah. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai sekitar 250 juta yang tersebar di sekitar 6000 pulau. Penyebaran penduduk tidak merata. Beberapa propinsi atau daerah mempunyai jumlah penduduk sangat padat, sementara beberapa daerah lainnya sedikit, bahkan sangat sedikit jumlah penduduknya. Pertumbuhan dan perkembangan beberapa kota di Indonesia sangat cepat dan pesat sementara beberapa daerah khususnya di desa dan daerah terpencil sangat tertinggal dan jauh dari pengembangan. Selain kesenjangan dalam pengembangan daerah, kesenjangan antara penduduk yang kurang beruntung dibandingkan

dengan mereka yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih baik sangat menonjol terutama di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Di sebagian besar kota terdapat penumpukan angkatan kerja produktif yang menganggur dan menunggu peruntungan untuk mendapat pekerjaan.

Sebenarnya masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah (pusat maupun daerah). Berbagai program telah diluncurkan pemerintah untuk membantu mengentaskan kemiskinan atau/dan menekan pengangguran. Selain itu, lewat kegiatan baksos (bakti sosial), berbagai organisasi sosial dan keagamaan seringkali ikut memberikan bantuan bahan makanan atau kadang-kadang dana. Sejauh pengamatan penulis banyak program dan bantuan tersebut belum berhasil mengatasi kondisi kemiskinan dan kesenjangan secara tuntas dan tidak terencana untuk mengatasi akar permasalahan.

Paper ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis model pengembangan masyarakat dengan pendekatan holistik untuk memberdayakan masyarakat. Paper mengulas kelemahan program pengabdian masyarakat yang sedang dan telah diterapkan dan memberikan masukan untuk membangun pengembangan masyarakat yang berkesinambungan. Diharapkan masukan dan saran bermanfaat untuk mengubah / memperbaiki kelemahan cara penerapan pengembangan masyarakat yang tidak menyentuh sampai ke akar permasalahan. Pengembangan masyarakat yang mensinergikan berbagai unsur potensial seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/ LSM termasuk *host communities* (masyarakat setempat) merupakan kekuatan yang mempunyai dampak besar dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan (*Sustainable Community Development*) Pemahaman pengembangan masyarakat mencakup hal yang sangat luas. Rumusan konsep pengembangan masyarakat berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah beberapa definisi tentang pengembangan masyarakat oleh beberapa pakar.

“The process of local decision-making and the development of programs designed to make their community a better place to live and work.” (Huie, 1976)

“A process of helping community people analyze their problems, to exercise as large a measure of community autonomy as is possible and feasible, and to promote a greater identification of the individual citizen and the individual organization with the community as a whole.” (Warren, 1978)

“An educational process designed to help adults in a community solve their own problems by group decision making and group action. Most community development models include broad citizen involvement and training in problem solving.” (Long, 1975)

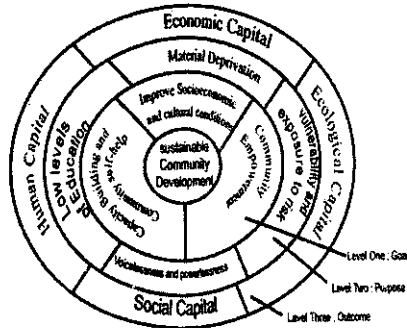
“An educational approach which would raise levels of local awareness and increase confidence and ability of community groups to identify and tackle their own problems.” (Darby & Morris, 1975)

Menurut Combat Poverty Agency (2000), badan di Irlandia yang menangani pengentasan kemiskinan, *community development is a process whereby those who are marginalized and excluded are enabled to gain in self-confidence, to join with others and to participate in actions to change their situation and tackle the problems that face their community.*

Jones dan Silva (1991) membeberkan model pengembangan masyarakat yang merupakan integrasi dari *problem-solving, community building, dan systems interaction*. Jones and Silva (1991) argue that *successful community development efforts are more truly an integrated practice model of community development. They see this model as one that utilizes problem-solving (borrowing from the process model) to generate action; community building (drawing from elements of the social planning model) to establish broad ownership for that action; and systems interaction (bringing characteristics of the social action model) to give necessary direction to the action.*

United Nations World Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future* (1987) menegaskan *“Sustainable development is development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”* Esensi pengembangan masyarakat berkelanjutan adalah pengembangan sumberdaya potensial agar berdayaguna untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan terus dapat bermanfaat untuk kebutuhan generasi masa depan. Holmberg, 1992; Reed, 1997; Harris et al., 2001 sepakat bahwa *sustainable development* mengandung 3 aspek penting, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pendapat ini diperkuat oleh McCall, 2003; Pegg, 2006 dan World Bank, 2001 yang mengatakan bahwa *“Development encompasses the social, ecological, human, and political dimensions of state-society and business-society relationships”*.

Muthuri (2008, 56) memaparkan pendekatan multidimensional untuk *community development* seperti terlihat dalam gambar berikut :



Gambar 1. Pendekatan multidimensi dalam pengembangan masyarakat

Menurut Muthuri, tujuan pengembangan masyarakat berkelanjutan mencakup 3 hal yaitu peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kondisi budaya, *capacity building* dan kemandirian, serta pemberdayaan masyarakat. (terlihat pada level 1). Untuk itu harus merespond masalah terkait dengan pendidikan, *material deprivation, vulnerability and exposure to risk*, dan ketakberdayaan (*voicelssness and powerlessness*) (level 2) yang kesemuanya berpotensi melemahkan pencapaian outcome yang diharapkan- *social capital (valuesatau resources* sebagai konsekuensi *personal* atau *business networks*), *economic capital*(pembangunan jalan, sarana komunikasi, employment dan lapangan kerja, kesehatan, perumahan), *ecological capital* (akses air bersih, udara dan lingkungan yang bersih dan sehat) dan *human capital*(pelatihan ketrampilan, kepemimpinan, membangun *entrepreneurial spirit*).

PBB menyelenggarakan *Sustainable Development Summit* (Konferensi Puncak Pengembangan Berkelanjutan) di New York pada bulan September 2015. 193 negara anggota PBB yang hadir telah menyepakati agenda untuk *Sustainable Development* yang berjudul '*Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development*'. Agenda berisi antara lain deklarasi, 17 *Sustainable Development Goals* dan 169 target dan merupakan kesepakatan bersama semua negara anggota untuk melakukan perencanaan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi berbagai kebutuhan sosial serta membangun pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 15 tahun (2015-2030) dengan landasan 5 pilar untuk pembangunan berkelanjutan (5 P's) yaitu *people, planet, prosperity, peace, and partnership*.

People

We are determined to end poverty and hunger, in all their forms and dimensions, and to ensure that all human beings can fulfil their potential in dignity and equality

and in a healthy environment. (mengentaskan kemiskinan dan kelaparan agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya)

Planet

We are determined to protect the planet from degradation, including through sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources and taking urgent action on climate change, so that it can support the needs of the present and future generations. (menyelamatkan bumi dari kehancuran dan memelihara tersedianya sumber daya alam untuk generasi masa kini dan masa mendatang)

Prosperity

We are determined to ensure that all human beings can enjoy prosperous and fulfilling lives and that economic, social and technological progress occurs in harmony with nature. (menjamin manusia dapat hidup makmur dan berkecukupan di dalam lingkungan yang harmonis dengan alam)

Peace

We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free from fear and violence. There can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development. (mendukung masyarakat yang adil dan damai, bebas dari rasa takut dan kekerasan)

Partnership

We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda through a revitalised Global Partnership for Sustainable Development, based on a spirit of strengthened global solidarity, focussed in particular on the needs of the poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, all stakeholders and all people. (mengupayakan kerjasama global untuk pengembangan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi semua negara, semua stakeholders dan bahkan semua orang)

III. PEMBAHASAN

Meskipun rumusan konsep *community development* berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, pada dasarnya *community development* merupakan suatu proses yang dirancang atau direncanakan untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas dari kondisi tidakberdaya menjadi mandiri - proses membangun masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. *Community development* merupakan konsep multidimensional yang mengintegrasikan tujuan ekonomis, tujuan sosial dan tujuan lingkungan secara seimbang.

Pemberdayaan Masyarakat

Esensi pengembangan masyarakat adalah melakukan perubahan atau pembaruan pada suatu komunitas yang berada dalam kondisi tidak berdaya atau keterpurukan dengan pendekatan 'bottom-up'. Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan analisis sosial untuk memahami akar permasalahan yang mendasar. Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada terciptanya lingkungan masyarakat yang dapat menikmati kualitas hidup lebih baik, sehat, aman serta mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan peluang, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai dengan situasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan selama ini masih problem based. Padahal ketidakberdayaan masyarakat meliputi segala aspek, selain faktor pendidikan, juga faktor sosial dan ekonomi, serta kondisi lingkungan dan kebijakan – kebijakan yang kurang kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dan produktivitas pelaku ekonomi mikro dan usaha kecil menengah dalam mengembangkan potensi lokal. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, pola pemberdayaan masyarakat yang direkomendasikan di Indonesia adalah pola dengan konsep *Community Based Development* (CBD). CBD menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, yaitu pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up intervention* yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. CBD berfokus pada akar permasalahan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. CBD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya.

Konsep CBD berasumsi pemberdayaan masyarakat bisa berhasil apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat turut mengambil inisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri. Pola CBD melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan. Dengan kata lain masyarakat harus ikut terlibat sebagai agen pembangunan atau sebagai motor penggerak dan bukan sekedar penerima manfaat (beneficiaries).

Pada era global perlu pemberdayaan yang menyeluruh yang mencakup aspek mikro dan makro, baik dari dalam diri maupun dari luar yang melibatkan segenap komponen masyarakat. Diperlukan pula pemimpin yang tidak hanya populis, akan tetapi juga mampu sebagai leader maupun manajer serta memiliki kekuatan moral. Untuk memajukan potensi daerah perlu bekal pengetahuan teknologi dan inovasi serta kreativitas kearah agropreneurship dan technopreneurship. Untuk itu perubahan pola berpikir dan bertindak serta kemampuan sebagai seorang entrepreneur diperlukan. Mencontoh kegiatan pemberdayaan yang berhasil di beberapa negara lain, maka pemberdayaan masyarakat perlu sejalan dengan

kegiatan riset. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara kolektif dan penuh tanggungjawab.

Penerapan Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) di masyarakat memiliki peranan penting yang saling melengkapi (*complementing roles*) dalam pemberdayaan masyarakat. Selain pemerintah (pusat dan daerah), peranan dunia usaha, lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi), asosiasi, kelompok agama, LSM dan organisasi lainnya semuanya diperlukan untuk bersinergi dan saling mendukung dalam merencanakan pembangunan secara utuh dan berkesinambungan.

Pemerintah

Sebenarnya pemerintah telah sangat peduli dengan masalah pemberdayaan. Hampir semua departemen memiliki program yang menggunakan istilah pemberdayaan. Misalnya Departemen Dalam Negeri dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaa), PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang sekarang berubah nama menjadi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri); Departemen Sosial dengan macam-macam program pemberdayaan fakir miskin, panti asuhan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Demikian juga di Departemen Pertanian dandepartemen lainnya. Sayangnya, di sini terlihat peran pemerintah yang tumpang tindih dan kurang terkoordinasi dengan baik sehingga terdapat program yang bersinggungan di beberapa departemen. Di sisi lain, pemerintah mempunyai keterbatasan, baik dari aspek dana, sdm dan expertise atau lainnya, sehingga tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri mendominasi program pemberdayaan ini. Dukungan dan peranserta dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya diperlukan untuk memperkuat dan terus mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengarahkan semua program dan kegiatan terkait selaras dan seiring dengan kebijakan pemerintah lainnya.

Pemerintah juga harus memastikan perannya sebagai motivator dan fasilitator untuk menggerakkan dan melancarkan/ memudahkan program pemberdayaan sampai berhasil. Pemerintah juga harus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan agar program berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Dunia Usaha

Pembangunan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama semua unsur yang ada di masyarakat kita termasuk dunia usaha. Pemerintah yang memang menurut Undang-Undang Dasar diamanatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa dukungan elemen lain seperti misalnya dunia usaha atau perusahaan.

Perusahaan merupakan bagian (sub sistem) dari sistem sosial yang keberadaannya tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dimana perusahaan berada. Perusahaan selayaknya memahami bahwa setiap perusahaan yang hadir di tengah komunitas tertentu, akan menjadi bagian dari lingkungan sosial tertentu tersebut. Karena itu perusahaan atau dunia usaha diharapkan ikut memikul tanggung jawab mensejahterakan masyarakat dalam arti luas.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep yang mendorong perusahaan untuk menyadari adanya keterikatan dalam lingkungan sosial dengan mempertanggungjawabkan akibat dari aktivitas perusahaan kepada pelanggan, karyawan, shareholders, masyarakat dan lingkungan dalam berbagai aspek. CSR memberi makna implementasi tanggung jawab dunia usaha turut mengembangkan masyarakat dan menjadi agen pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar bisa dalam bentuk kemitraan, pengembangan komunitas (misalnya pelatihan ketrampilan, atau pemberian dan, bina lingkungan atau layanan publik lainnya).

Kelemahan yang banyak terjadi selama ini adalah implementasi CSR berbentuk pemberian bantuan (berupa sembako atau sejenis) yang mengarah ke faktor kedermawanan/ charity. Kegiatan charity dianggap kurang tepat karena kapasitas masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula atau tidak merubah kemampuan mereka bahkan sebaliknya menyebabkan dampak ketergantungan. Masyarakat semata-mata berharap selalu ada bantuan serupa. Program charity adalah program jangka pendek dan untuk masa sesaat.

Perguruan Tinggi

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. UU no 12 Pasal 58 menegaskan bahwa fungsi dan peran perguruan tinggi antara lain adalah sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, sebagai wadah pendidikan calon pemimpin bangsa dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada dua peran utama yang dapat dimainkan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat di Indonesia yaitu perguruan tinggi sebagai agen perubahan (agent of change) dan sebagai penggagas dalam pengembangan. Sebagai agen perubahan perguruan tinggi diharapkan mampu memelopori perubahan dan berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa mendatang. Perguruan tinggi ikut berperan sebagai penggagas untuk mendorong perubahan kearah pengembangan yang integratif baik dalam aspek intelektual, maupun juga sosial ekonomiserta lingkungan.

Dengan fungsi dan peran tersebut maka lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah sentra pembangunan sumber daya manusia. Dalam menghadapi

perubahan yang cepat di masyarakat di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat pula, perguruan tinggi harus mampu menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi. Beberapa hal yang bisa dilakukan perguruan tinggi dalam pengembangan masyarakat antara lain:

Pertama, tradisi riset yang kuat di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki keunggulan dalam menerapkan riset untuk mengidentifikasi masalah serta mengevaluasi dampak atau efektifitas program. Kerap kali kesalahan dalam mengidentifikasi masalah adalah karena riset yang berjarak dengan objek yang menjadi bahan kajian. Dianjurkan penerapan riset partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencarian data atas problem-problem yang muncul.

Kedua, isu-isu yang terkait dengan bantuan substansi dalam gagasan ide, inovasi dan penerapan TTG (teknologi tepat guna) untuk mendukung proram pengembangan masyarakat yang lebih efektif.

Ketiga, fungsi pendampingan. Perguruan tinggi mempunyai sumberdaya potensial untuk berkolaborasi dan melakukan pendampingan baik dalam hal teknis ataupun lainnya misalnya penyusunan regulasi atau advokasi.

Keempat, hal-hal yang sifatnya jasa atau layanan akademik. Misalnya memberikan pelatihan, pembentukan bank data dan lainnya.

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

Pengembangan masyarakat adalah hal kompleks multidimensi yang memerlukan pemikiran dari berbagai perspektif. Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga sosial dan keagamaan, serta dunia usaha telah berperan aktif dan melakukan beragam upaya untuk pengembangan masyarakat. Sayangnya banyak program yang tidak berdampak seperti yang diharapkan. Sering kali program yang dilakukan berbentuk kegiatan baksos (bakti sosial) yaitu bantuan dengan dampak sesaat atau jangka pendek. Program semacam ini tidak akan memberdayakan masyarakat atau membuat mereka berupaya mandiri tetapi semakin membuat mereka selalu berharap menerima bantuan berikutnya atau selalu bergantung pada bantuan luar secara berkala. Yang lebih parah adalah kenyataan di lapangan bahwa sering kali santunan berbentuk pemberian dana atau bantuan sembako tidak diterima sepenuhnya oleh pihak yang layak dan pantas menerima. Kelemahan lainnya adalah kenyataan bahwa terlalu banyak program yang merupakan kegiatan incidental dan sepotong-sepotong (*fragmented program*) yang tidak direncanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terlalu banyak program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi satu dengan lainnya. Misalnya organisasi sosial merencanakan program sendiri. Perusahaan atau dunia usaha juga memikirkan program sendiri. Di pemerintah juga banyak program dengan sebutan pemberdayaan yang diterapkan di berbagai departemen tanpa koordinasi antar

departemen. Di sini terlihat banyak program yang saling tumpang tindih dan bersinggungan bahkan tidak mampu mengatasi akar permasalahan.

Pengembangan masyarakat berkelanjutan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata-mata. Diperlukan strategi kolaboratif (*collaborative strategies*) yang melibatkan berbagai unsur – dunia usaha, perguruan tinggi, LSM atau organisasi lainnya, bahkan masyarakat setempat (*host community*) karena masing-masing mempunyai potensi kekuatan untuk disinergikan dan diintegrasikan dalam mengatasi permasalahan pengembangan masyarakat berkelanjutan dengan tuntas. Mengutip keberhasilan di beberapa negara, penerapan pendekatan *community-based* sangat penting di mana masyarakat (*host community*) turut mengambil inisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. Masyarakat harus ikut terlibat sebagai agen pembangunan atau sebagai motor penggerak dan bukan sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*). Hal penting lainnya bahwa outcome pengembangan masyarakat berkelanjutan harus mampu mengatasi tidak saja masalah sosial dan ekonomi tetapi juga masalah lingkungan.

Beberapa pendekatan yang disarankan dalam implementasi pengembangan masyarakat berkelanjutan, antara lain :

1. Pendekatan potensi lingkungan – memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat.
2. Pendekatan kewilayahan – mempertimbangkan dampak pengembangan terhadap wilayah yang akan dikembangkan.
3. Pendekatan manajemen - melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat.
4. Pendekatan *community-based* - melibatkan partisipasi semua unsur di masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka dalam memecahkan masalah yang ada.
5. Pendekatan system yang holistik – mengidentifikasi semua permasalahan, menganalisis akar permasalahan dan menemukan solusi yang efektif.

Pemerintah seharusnya lebih berperan sebagai inisiator, regulator dan fasilitator ketimbang pelaksana program. Pemerintah memberikan arahan kebijakan dan menerbitkan aturan-aturan yang jelas dan bijak sebagai acuan pelaksanaan program. Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan program serta ikut melakukan pengawasan dalam implementasi program sehingga program benar-benar berjalan sesuai indikator keberhasilan. Untuk implementasi program, pemerintah menggandeng dan melibatkan semua unsur - perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi sosial atau LSM dan masyarakat setempat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Blowfield, M. (2005). Corporate social responsibility: Reinventing the meaning of development. *International Affairs*, 3, 515-524.

- Dobie, Philip. 2002. Models for National Strategies: Building Capacity for Sustainable Development. *Development Policy Journal* 1: 1-18. <http://www.undp.org/capacity/resources.shtml> (27 January 2009).
- Hecht, Alan D. 1999. The Triad of Sustainable Development: Promoting Sustainable Development in Developing Countries. *Journal of Environment & Development* 8, no.2: 111-132.
- Hidayat, S. 2001. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Sebuah Rekonstruksi Konsep CBD.PT. Pustaka Quantum, Jakarta
- Hersugondo.2009, Peran Dunia Usaha Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Indonesia. Fokus Ekonomi (FE), Vol.8, No.2 Agustus 2009, Hal.97 –105
- Idemudia, U. 2008. Conceptualising the CSR and development debate: Bridging existing analytical gaps. *Journal of Corporate Citizenship* 29:91–110.
- Jones, B. and J. Silva. 1991. *Problem Solving, Community Building, and Systems Interaction: An Integrated Practice Model for Community Development*. Journal of the Community Development Society. Vol. 22, No. 2: 1-21.
- Muthuri, J., Moon, J.& Idemudia,U. (2008). Corporate Innovation and Sustainable Community Development in Developing Countries. *Sage Journals. Business & Society* 51, no.3 (2012): 355-381
- Roseland, M. (2000). Sustainable community development: Integrating environmental, economic and social objectives. *Progress in Planning*, 54(2), 190-207.
- Suharto,E. 2011. Pemberdayaan rakyat. Ceramah diklat PIM II. LAN, Jakarta
- Valentine, James U. 1998. *Capacity Building in Developing Countries: Human & Environmental Dimensions*. Greenwood Publishing Group, Inc. <http://www.ebrary.com.miinan.bib.bth.se> (27 January 2009).
- Vermaak, N J. 2001. Rural financial schemes' contribution to community development. *Community Development Journal* 36(1): 42-52.
- World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

Tedjasuksmana, Budianto. 2014. *Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 *Towards a New Indonesia Business Architecture* Sub Tema: "Business And Economic Transformation Towards AEC 2015" Fakultas Bisnis dan Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.